

**SOSIALISASI RENCANA PEMEKARAN PROVINSI BARITO RAYA UNTUK  
MENINGKATKAN PEMAHAMAN PELAKU USAHA KECIL DAN  
MENENGAH DI BUNTOK**

**Vivy Kristinae<sup>1\*</sup>, Erwin Prasetya Toepak<sup>2</sup>, Ani Mahrita<sup>3</sup>, Jonathan Giovanni<sup>4</sup>, Rian Sidiq  
Prakoso<sup>5</sup>, Roby Sambung<sup>6</sup>, Nurlia Eka Damayanti<sup>7</sup>, Meylinda Sukmani<sup>8</sup>**

<sup>1,3,4,5,6,7,8</sup>Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Palangka Raya, Kalimantan Tengah,  
Indonesia

<sup>2</sup>Program Studi Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Palangka Raya,  
Kalimantan Tengah, Indonesia

E-mail : [\\*vivi.cristina@feb.upr.ac.id](mailto:*vivi.cristina@feb.upr.ac.id)

**ARTICLE INFO**

**Article history:**

Received :02-05-2024

Revised :20-05-2024

Accepted:28-05-2024

**Key words:**

Pemekaran, Barito Raya, Usaha  
Kecil Menengah, Buntok

DOI: 10.62335

**ABSTRACT**

*Administrative services for small and medium enterprises (SMEs) in provinces that have many districts have big challenges such as the implementation of inadequate administrative systems and suboptimal public services due to limited resources and scarcity of transportation. Central Kalimantan Province has 14 administrative regions, and the vastness of these administrative regions can pose problems for the government, especially in terms of optimizing public services. To overcome this, this can be done through the development of a new provincial region in Central Kalimantan so that it can increase the distribution of public services for small and medium businesses. This community service (PkM) activity was carried out with the aim of increasing the understanding of small and medium business actors in Buntok, South Barito regarding the plan to establish the Greater Barito Province. This PkM was carried out using the Focus Group Discussion method and was carried out at Warung Mama Nisa Kamper. The results of this activity show that business actors at Warung Mama Nisa Kamper know the purpose of establishing the Greater Barito Province.*

**ABSTRAK**

Pelayanan administrasi bagi usaha kecil dan menengah (UKM) di provinsi yang memiliki banyak kabupaten mempunyai tantangan yang besar seperti penerapan sistem administrasi yang tidak memadai dan layanan publik yang tidak optimal akibat keterbatasan sumber daya dan kelangkaan transportasi. Provinsi Kalimantan Tengah memiliki 14 wilayah administratif, dan luasnya wilayah administratif ini dapat memberikan masalah bagi pemerintah khususnya dalam hal optimasi layanan publik. Untuk mengatasi hal tersebut dapat dilakukan melalui pembangunan daerah Provinsi baru di Kalimantan Tengah sehingga dapat meningkatkan pemerataan pelayanan publik bagi usaha kecil dan menengah. Kegiatan pengabdian kepada

masyarakat (PkM) ini dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman para pelaku usaha kecil dan menengah di Buntok, Barito Selatan mengenai rencana pembentukan Provinsi Barito Raya. PkM ini dilakukan dengan menggunakan metode Focus Group Discussion dan dilaksanakan di Warung Mama Nisa Kamper. Hasil kegiatan ini menunjukkan bahwa pelaku usaha di Warung Mama Nisa Kamper mengetahui tujuan dari pembentukan Provinsi Barito Raya.

## PENDAHULUAN

Pembentukan Daerah Otonomi Baru atau DOB memiliki tujuan untuk merangsang pesatnya kemajuan pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Pemerintah tidak hanya membangun infrastruktur fisik, namun juga menetapkan kebijakan pembangunan ekonomi terkait melalui pemerintahan daerah otonom baru. Pembentukan daerah otonom baru ini dengan memperluas daerah-daerah otonom yang sudah ada sudah menjadi praktik yang dilakukan sejak awal berdirinya Negara Republik Indonesia. Prosesnya pemekaran daerah ini dimulai dengan pembentukan wilayah administratif, yang kemudian berkembang menjadi wilayah mandiri. Menurut Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, suatu daerah dapat dibentuk dengan menggabungkan beberapa daerah atau bagian-bagian dari daerah yang bertetangga, atau dengan membagi suatu daerah menjadi dua daerah atau lebih. Penerapan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah telah mendorong terbentuknya provinsi, kabupaten, dan kota sebagai wilayah administratif tersendiri. Kondisi ini mengakibatkan adanya variasi antar zona pertumbuhan provinsi, kabupaten, dan kota, dimana beberapa tempat mempunyai konsentrasi penduduk atau aktivitas yang tinggi, sedangkan tempat lainnya memiliki konsentrasi yang lebih rendah (Afrianto, 2023; Sudarmanto et al., 2022).

Pemerintah daerah khususnya pemerintah provinsi mempunyai kewenangan untuk mendistribusikan anggaran, termasuk belanja pemerintah, untuk memfasilitasi keberhasilan pelaksanaan program pembangunan ekonomi yang telah disetujui. Hal ini memastikan tercapainya kemajuan ekonomi yang optimal di wilayah tersebut, yang mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi inklusif merupakan suatu metode yang digunakan untuk menilai keberhasilan pembangunan ekonomi suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi inklusif tidak hanya mengutamakan tujuan peningkatan output, namun juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Kesejahteraan dinilai berdasarkan langkah-langkah seperti penurunan pengangguran, penurunan kesenjangan dan tingkat kemiskinan, serta memastikan kesetaraan kesempatan dalam partisipasi ekonomi masyarakat (Safitri et al., 2021).

Salah satu peran pemerintah daerah khususnya pemerintah provinsi dalam melayani partisipasi ekonomi masyarakat adalah dengan berbagai kebijakan yang mendukung pengembangan usaha kecil dan menengah. Pemerintah provinsi di Indonesia mempunyai peran penting dalam memberikan dukungan kepada usaha

kecil dan menengah (UKM) melalui berbagai inisiatif dan program. Mereka terlibat dalam implementasi kebijakan seperti program sertifikasi halal untuk memperkuat sumber daya manusia usaha kecil dan menengah (UKM). Mereka juga menawarkan program bantuan langsung tunai seperti BPUM untuk menstimulasi perekonomian di saat krisis seperti pandemi COVID-19 (Annisa Lokita Lubis, 2023; Jaenal Effendi, 2023).

Selain itu, pemerintah daerah provinsi dapat memfasilitasi pemeriksaan laporan keuangan oleh auditor independen untuk meningkatkan kelayakan kredit UKM dan meningkatkan kemampuan mereka untuk mendapatkan pendanaan. Pemerintah provinsi berperan dalam menurunkan angka kemiskinan dengan mendorong investasi, baik dalam maupun luar negeri, serta mendorong berdirinya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Kegiatan-kegiatan ini berkontribusi terhadap pengurangan kemiskinan di negara ini. Di Indonesia, pemerintah provinsi mempunyai peran penting dalam menciptakan lingkungan yang mendukung bagi usaha kecil dan menengah (UKM) untuk mencapai kesejahteraan dan memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi negara (Herman S. Soegoto et al., 2022; Jenri Mp Panjaitan et al., 2021; Kelly W. Kelly & Vivin Margaretha Vivin, 2023).

Pelayanan administrasi bagi usaha kecil dan menengah (UKM) di provinsi yang memiliki banyak kabupaten di Indonesia menghadapi berbagai kendala. Hal ini termasuk implementasi sistem administrasi yang tidak memadai, keterbatasan legislatif yang menghambat upaya reorganisasi, dan kesulitan dalam mengoptimalkan layanan publik karena kekurangan transportasi dan kelangkaan sumber daya. Selain itu, usaha kecil dan menengah (UKM) Indonesia menghadapi tantangan di berbagai bidang seperti keuangan, sumber daya manusia, pemasaran, operasi, administrasi, dan manajemen organisasi, yang mempengaruhi kesiapan mereka menghadapi digitalisasi. Untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha kecil dan menengah (UKM) di Indonesia, tantangan-tantangan ini perlu diatasi dengan berfokus pada peningkatan infrastruktur, penerapan reformasi legislatif, dan fasilitasi kegiatan transfer pengetahuan maupun pemekaran wilayah (Dene Herwanto & Amalia Suzianti, 2020; Jusuf Madubun et al., 2017; Kasiati Kasiati & Heru Santoso Wahito Nugroho, 2020; Lina Anatan & Nur, 2023; Mas Pungky Hendra Wijaya & Mohammad Zulfikar Ali, 2021).

Provinsi Kalimantan Tengah yang merupakan wilayah administratif di Pulau Kalimantan. Provinsi Kalimantan Tengah memiliki luas wilayah 153.564,5 km<sup>2</sup> dan berpenduduk 2.670 ribu jiwa. Provinsi ini terbagi menjadi 14 wilayah administratif yang terdiri dari 13 kabupaten dan 1 kota. Kalimantan Tengah itu sendiri merupakan provinsi terbesar di Indonesia (Detik.com, 2024; Kompas, 2022). Besarnya luas wilayah administratif provinsi ini dapat menjadi sebuah masalah tersendiri bagi pemerintah provinsi dalam memberikan layanan publik kepada para pelaku usaha kecil dan menengah. Hal ini perlu mendapat perhatian karena menyebabkan tidak meratanya layanan yang dapat diberikan mengingat keterbatasan dana sementara luas wilayah luas dan banyaknya pelaku usaha kecil dan menengah. Untuk mengatasi hal ini, maka pemekaran wilayah provinsi Kalimantan Tengah dapat menjadi solusi untuk meningkatkan pemerataan layanan publik bagi pelaku usaha kecil dan menengah. Salah satu wilayah di Provinsi Kalimantan Tengah yang akan dimekarkan menjadi wilayah administrasi provinsi baru adalah daerah Barito Raya.

Empat kabupaten di wilayah Barito Raya yakni Barito Timur, Barito Selatan, Barito Utara dan Murung Raya nantinya akan bergabung menjadi satu untuk membentuk provinsi baru bernama Barito Raya (antaranews.com, 2023; Latif, 2023). Pembentukan ini diharapkan dapat menjadi solusi pemerataan layanan publik sehingga dapat mendorong perkembangan dari pelaku usaha kecil dan menengah.

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan untuk meningkatkan pemahaman pelaku usaha kecil menengah yang ada di Kota Buntok, Barito Selatan terkait rencana pembentukan Wilayah Provinsi Barito Raya. Sosialisasi ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan pemahaman mengenai kebermanfaatan pemekaran wilayah agar prose pelayanan publik dapat lebih optimal untuk dilakukan.

## **METODE PELAKSANAAN**

Kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan di Warung Mama Nisa Kamper. Warung ini bergerak di bidang pengolahan ikan bintahukan menjadi produk makan. Pelaku usaha kecil menengah ini terletak di Kota Buntok, Kabupaten Barito Selatan. Kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan pada Bulan April 2024.

Metode yang digunakan dalam sosialisasi adalah menggunakan metode *Focus Group Discussion* (FGD). Pertemuan tatap muka atau *Focus Group Discussion* (FGD) merupakan salah satu metode yang efektif untuk sosialisasi kegiatan pengabdian masyarakat. Tahapan yang dilakukannya terdiri dari :

### **1. Tahap Perencanaan**

Pada tahap ini tim PkM melakukan perencanaan terkait materi yang akan disampaikan terkait dengan rencana pembentukan Provinsi Barito Selatan.

Pada tahap ini tim juga menentukan lokasi dan target peserta.

### **2. Tahap Koordinasi**

Pada tahap ini, dilakukan koordinasi dengan pihak Warung Mama Nisa Kamper terkait waktu pelaksanaan. Pada tahap ini juga dipastikan semua pihak yang terlibat mengetahui peran dan tanggung jawab masing-masing.

### **3. Pelaksanaan FGD**

Pada kegiatan FGD, dilakukan pemaparan materi dan penyampaian informasi mengenai rencana pemekaran kepada pelaku usaha Warung Mama Nisa Kamper. Pada kegiatan ini juga dilakukan proses diskusi dan tanya jawab untuk mendorong peserta untuk berbagi pandangan.

### **4. Penutupan dan Tindak Lanjut**

Pada tahap ini fasilitator merangkum poin-poin penting yang dibahas selama diskusi dan menyimpulkan hasil FGD. Tidak hanya itu, juga diucapkan terima kasih kepada semua peserta atas partisipasinya dan sampaikan informasi kontak untuk pertanyaan lebih lanjut.

Melalui tahapan-tahapan ini, FGD dapat menjadi alat yang efektif untuk mengumpulkan masukan dari masyarakat, membangun konsensus, dan memastikan bahwa kegiatan pengabdian masyarakat dirancang dan dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan dan aspirasi lokal.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penyampaian materi mengenai urgensi dan kebermanfaatan dari pembentukan Provinsi Barito Raya dilakukan untuk memberikan wawasan bagi

pelaku usaha kecil dan menengah di Kota Buntok khususnya di Warung Mama Nisa Kamper. Pembentukan provinsi baru dari wilayah yang memiliki banyak kabupaten seperti Provinsi Kalimantan Tengah dapat memberikan berbagai manfaat bagi pemerintahan, masyarakat, dan pembangunan regional. Berikut adalah beberapa manfaat utama dari pembentukan provinsi baru:

### **1. Peningkatan Efektivitas Pemerintahan**

- **Dekat dengan Warga:** Pembentukan provinsi baru memungkinkan pemerintah provinsi lebih dekat dengan masyarakat, sehingga pelayanan publik bisa lebih cepat dan responsif.
- **Pengelolaan yang Lebih Baik:** Pemerintah daerah dapat lebih fokus mengelola wilayah yang lebih kecil dan spesifik, sehingga pengelolaan sumber daya dan administrasi lebih efisien.

### **2. Peningkatan Pembangunan Infrastruktur**

- **Akses yang Lebih Mudah:** Provinsi baru seringkali mendapatkan prioritas dalam pembangunan infrastruktur, seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya, untuk mendukung perkembangan wilayah baru.
- **Pemerataan Pembangunan:** Mempermudah perencanaan dan pelaksanaan proyek pembangunan yang lebih merata, mengurangi ketimpangan antar wilayah.

### **3. Penguatan Ekonomi Lokal**

- **Peningkatan Investasi:** Pembentukan provinsi baru dapat menarik investasi lokal dan asing, karena adanya potensi pasar baru dan kebijakan yang lebih mendukung.
- **Pengembangan Sumber Daya Alam:** Wilayah baru dapat lebih fokus pada pengembangan dan pengelolaan sumber daya alam yang ada di wilayah tersebut.

### **4. Penyerapan Tenaga Kerja**

- **Pembukaan Lapangan Kerja:** Pembangunan infrastruktur dan peningkatan aktivitas ekonomi di provinsi baru akan menciptakan banyak peluang kerja bagi penduduk setempat.
- **Peningkatan Pelayanan Publik:** Membutuhkan tambahan pegawai pemerintah dan tenaga kerja lainnya untuk mendukung operasional pemerintahan provinsi baru.

### **5. Penguatan Identitas dan Budaya Lokal**

- **Pelestarian Budaya:** Provinsi baru dapat lebih fokus pada pelestarian dan pengembangan budaya lokal, memperkuat identitas budaya daerah tersebut.
- **Peningkatan Pariwisata:** Dengan identitas yang kuat, provinsi baru dapat menarik lebih banyak wisatawan yang tertarik dengan budaya dan keunikan lokal.

### **6. Peningkatan Partisipasi Masyarakat**

- **Keterlibatan dalam Pengambilan Keputusan:** Masyarakat memiliki kesempatan lebih besar untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan di tingkat provinsi, karena akses yang lebih mudah dan hubungan yang lebih dekat dengan pemerintah.

- **Peningkatan Kesadaran Politik:** Adanya provinsi baru dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi politik masyarakat, karena mereka merasa suara mereka lebih diperhatikan.

#### 7. Penguatan Keamanan dan Stabilitas

- **Pemantauan Lebih Baik:** Dengan wilayah yang lebih kecil, pemantauan dan penegakan hukum bisa lebih efektif, sehingga meningkatkan keamanan dan ketertiban di daerah.
- **Respon Cepat terhadap Krisis:** Pemerintah provinsi baru dapat lebih cepat merespon situasi darurat atau krisis di wilayah mereka, seperti bencana alam atau masalah sosial.

#### 8. Desentralisasi dan Otonomi Daerah

- **Penguatan Otonomi:** Pembentukan provinsi baru adalah bentuk dari desentralisasi pemerintahan, memberikan otonomi yang lebih besar kepada daerah untuk mengatur dan mengelola urusan mereka sendiri.
- **Peningkatan Kesejahteraan:** Dengan otonomi yang lebih besar, pemerintah daerah dapat lebih fokus pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal.

Kegiatan sosialisasi ini ditutup dengan sesi foto bersama antara tim PkM dengan pelaku usaha Warung Mama Nisa Kamper dan Bappeda Kabupaten Barito Selatan yang ditunjukkan pada **Gambar 1** dan **2**.



**Gambar 1.** Dokumentasi FGD Bersama Pelaku Usaha di Kota Bunto



**Gambar 2. Dokumentasi Koordinasi Bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito. Selatan**

## KESIMPULAN

Pelaku usaha warung makan Warung Mama Nisa Kamper memahami rencana pemekaran Provinsi Barito Raya. Pemilik Warung Mama Nisa Kamper memiliki harapan agar ke depan saat terjadi pemekaran, pelaku UMKM bisa diberi pelatihan atau fasilitas pendukung yang bisa bantu mempromosikan produk unggulan UMKM. Adapun pembentukan provinsi baru, meskipun memiliki banyak manfaat, juga perlu dilakukan dengan perencanaan yang matang dan analisis mendalam untuk memastikan bahwa manfaat yang diharapkan benar-benar dapat tercapai dan tidak menimbulkan masalah baru.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afrianto, A. (2023). Analisis Potensial dan Peluang Pengembangan Wilayah dalam Kerangka Pembentukan Daerah Otonomi Baru. *Management and Accounting Research Statistics*, 3(2), Article 2. <https://doi.org/10.59583/mars.v3i2.44>
- Annisa Lokita Lubis. (2023). Implementasi Penyaluran Dana Bantuan Langsung Tunai bagi UMKM pada Masa Pandemi di Kota Tangerang Selatan. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 7(1). <https://doi.org/10.58258/jisip.v7i1.4435>
- antaranews.com. (2023, August 14). *Sekda: DOB Barito Raya wujudkan efektivitas penyelenggaraan pemda.* Antara News. <https://www.antaranews.com/berita/3679554/sekda-dob-barito-raya-wujudkan-efektivitas-penyelenggaraan-pemda>
- Dene Herwanto & Amalia Suzianti. (2020). *An Environmental Ergonomics Review of Small Medium Enterprises Workplace Condition in Indonesia.* 213–218. <https://doi.org/10.1145/3400934.3400974>
- Detik.com. (2024). *5 Provinsi Terluas di Indonesia, Bisa Tebak Mana Saja?* detikedu. <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-7305680/5-provinsi-terluas-di-indonesia-bisa-tebak-mana-saja>
- Herman S. Soegoto, Suryatno Wiganepdo Soegoto, & Daniel Francois Meyer. (2022). The role of domestic investment, foreign investment and the number of Micro Small and Medium-Sized Enterprises to reduce poverty in Indonesia. *Journal of Eastern*

- European and Central Asian Research*, 9(5), 901–913.  
<https://doi.org/10.15549/jeecar.v9i5.1072>
- Jaenal Effendi. (2023). Human Resources Readiness of Small Medium Enterprises (SMEs) for Halal Product in Indonesia. *Global Review of Islamic Economics and Business (Ed. Online)*, 10(2), 083–095. <https://doi.org/10.14421/grieb.2022.102-08>
- Jenri Mp Panjaitan, Rudi Prasetya Timur, & Sumiyana Sumiyana. (2021). *How does the Government of Indonesia empower SMEs? An analysis of the social cognition found in newspapers*. 13(5), 765–790. <https://doi.org/10.1108/JEEE-04-2020-0087>
- Jusuf Madubun, Haedar Akib, & Jasruddin. (2017). The Prototype Model of Asymmetric Decentralization in Providing Public Services to the Island Areas. *Mediterranean Journal of Social Sciences*, 8(2), 209–217. <https://doi.org/10.5901/MJSS.2017.V8N2P209>
- Kasiati Kasiati & Heru Santoso Wahito Nugroho. (2020). *Evaluation of the implementation of the administrative information system of Indonesian midwives association in east java*. 18(2), 46–53. <https://doi.org/10.30996/DIA.V18I2.4096>
- Kelly W. Kelly & Vivin Margaretha Vivin. (2023). The Role of Audit In Small And Medium Enterprises. *International Journal of Social Science Education Communication and Economics (SINOMICS JOURNAL)*, 1(6), 819–824. <https://doi.org/10.54443/sj.v1i6.93>
- Kompas. (2022, November 14). *Daftar Kabupaten dan Kota di Provinsi Kalimantan Tengah Halaman all*. KOMPAS.com. <https://regional.kompas.com/read/2022/11/14/164251378/daftar-kabupaten-dan-kota-di-provinsi-kalimantan-tengah>
- Latif, H. A. (2023, January 5). *Pemekaran Provinsi Baru di Kalteng, Barito Raya Paling Berpeluang*. KaltengPos. <https://kaltengpos.jawapos.com/berita-utama/05/01/2023/pemekaran-provinsi-baru-di-kalteng-barito-roya-paling-berpeluang/>
- Lina Anatan & Nur. (2023). Micro, Small, and Medium Enterprises' Readiness for Digital Transformation in Indonesia. *Economies*, 11(6), 156–156. <https://doi.org/10.3390/economies11060156>
- Mas Pungky Hendra Wijaya & Mohammad Zulfikar Ali. (2021). *Legislation Impediments in Reorganising Government Bodies in Indonesia*. 9(1), 1–12. <https://doi.org/10.20961/BESTUUR.V9I1.51633>
- Safitri, M. I. D., Ananda, C. F., & Prasetyia, F. (2021). Analisis dampak belanja pemerintah daerah terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif Jawa Timur. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 6(2), Article 2. <https://doi.org/10.33105/itrev.v6i2.339>
- Sudarmanto, K., Arifin, Z., & Junaidi, M. (2022). *Peningkatan Pemahaman Rencana Pemekaran Kecamatan di Kecamatan Pedurungan Kota Semarang*. 3(2).